

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan tersendiri di masa pandemi. Hajat pesta demokrasi yang mulanya direncanakan pelaksanaannya pada pertengahan 2020, harus rela diundur menjadi akhir tahun tepatnya pada awal Bulan Desember atas beberapa pertimbangan. Pihak pemerintah yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, KPU, hingga Bawaslu telah bersepakat untuk melaksanakan Pilkada di masa pandemi ini. Pertimbangan mendasar itu diambil karena sebanyak 270 daerah perlu dipimpin kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat untuk mengawal berbagai kebijakan dalam menghadapi wabah COVID-19 di setiap daerah (Ulfa & Robi, 2020).

Sepanjang tahun 2020 Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat segala tatanan kehidupan mengalami perubahan yang sangat signifikan termasuk bidang politik dan bidang pendidikan. Pemerintah tetap bersikeras melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020 saat wabah corona belum mereda yang membuat partisipasi politik masyarakat di Kota Solok semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dibidang pendidikan dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembelajaran jarak jauh dengan dalih untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Sebagian negara berpikiran bahwa pemilu akan menjadi beban berat, mulai dari aspek biaya hingga masalah teknis pelaksanaan yang menyedot banyak sekali sumber daya manusia, belum lagi

persoalan penyediaan serta distribusi logistik pemilu proses kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara, namun masih ada 47 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu 2020 di tengah pandemi diantaranya Amerika Serikat, Belarusia, Bolivia, Korea Selatan dan Jepang (Harian Kompas, 6 Desember 2020)

Indonesia menjadi salah satu dari negara yang berani mengambil risiko mengadakan pemilihan di bawah ancaman pandemi Covid-19, hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan Pilkada selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih. Beberapa lembaga survei telah memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 akan berada di bawah target KPU sebesar 77,5%. Indikator Politik Indonesia misalnya, mencatat jumlah pemilih di Indonesia yang kemungkinan besar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebanyak 40,7%, sementara sebanyak 47,1% responden menyatakan kemungkinan mereka datang ke TPS kecil (Indikator Politik Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antar partai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penanganan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi. Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mendukung Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah, perubahan

semacam itu tampak pada cara orang mendukung partai politik. Ada beberapa tahapan yang ditunda KPU, yakni pelantikan petugas pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), termasuk pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (MP Aji, 2020)

Situasi yang normal dan kondusif orang dengan senang hati mau mendukung salah satu calon walikota/bupati yang diutus salah satu partai politik, dalam kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020 merasa khawatir untuk mendukung salah satu calon walikota/bupati karena khawatir terhadap penularan virus. Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun pemerintah pusat mengklaim pelaksanaan pemungutan suara secara umum sudah sesuai protokol kesehatan. Angka golput yang tinggi di masyarakat akan menghambat cita-cita demokrasi Negara Indonesia. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik mutlak dilakukan meskipun saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Terbukanya partisipasi politik merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik, dengan semakin terbukanya sikap politik masyarakat maka akan menghasilkan pemimpin yang demokratis yang akan menjamin kesamaan hak dan kewajiban masyarakatnya (BBC News Indonesia 2020).

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik akan berdampak pada kesamaan hak dan kesempatan dalam pelaksanaan pemilihan langsung

berpartisipasi berarti turut serta secara sukarela dan tanpa adanya intimidasi atau perasaan terpaksa dalam melakukan suatu hal. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menekan angka golput, dengan demikian kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan semakin meningkat. Pandemi Covid-19 mengakibatkan segala kehidupan global berubah. Pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia khususnya dibidang politik, sistem politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang menuntut warga negaranya untuk selalu berpartisipasi aktif secara bermutu sebagai bagian dari *to be good citizen*, dengan adanya wabah ini maka partisipasi aktif warga Negara Indonesia bergeser dari partisipasi langsung menjadi partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berarti turut serta dalam politik praktis seperti mencalonkan diri dalam pemilihan atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon tertentu, sedangkan partisipasi tidak langsung berarti memberikan gagasan, menyampaikan pikiran, dan memaparkan kehendak politik melalui media, baik media cetak seperti koran maupun media elektronik seperti siaran televisi. Media dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan politik. Selain media cetak dan media elektronik, masyarakat pun bisa berpartisipasi dalam politik melalui media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram yang terkoneksi dengan internet dalam politik internet telah memainkan peranannya dengan memudahkan masyarakat untuk aktif menyuarakan pendapat dan pandangan mereka yang berbeda terhadap pilihan politiknya (T Heru Nurgiansah, 2021).

Proses sosialisasi politik berlaku bagi rakyat, bahkan proses ini sangat penting bagi mereka. Bagi para pemilih, sosialisasi politik tidak mungkin dihindari. Bagaimanapun mereka harus belajar menjadi pemilih yang menjunjung

tinggi demokrasi walaupun di tengah pandemi Covid-19. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat yang satu kepada individu atau kelompok yang lain dalam suatu sistem politik. Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kepribadian serta tingkah laku para insan politik. Semua ini pada gilirannya membentuk apa yang disebut layar persepsi, dengan layar persepsi orang menerima informasi-informasi politik. Layar persepsi itu dapat berubah sesuai dengan perubahan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap individu yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua informasi politik dengan sendirinya diterima. Ada informasi politik yang dapat diterima dan ada yang ditolak. Penerimaan atau penolakan atas informasi-informasi politik itu menentukan perbedaan perilaku politik, khususnya menentukan perbedaan partisipasi diantara individu yang satu dan individu yang lain (Khoirul Saleh & Achmat Munif, 2015)

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik, kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara

aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*).

Garis besar perkembangan yang sama untuk berbagai individu, tetapi tidak semua individu berkembang dengan jalan politik yang sama, apalagi dengan kecepatan yang sama. Tingkatan pengetahuan, pemahaman akan nilai-nilai, dan sikap-sikap hidup untuk mempengaruhi cara orang untuk menggunakan hak pilihnya. Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Bentuk partisipasi politik pun bervariasi dan konsep partisipasi politik pun mencakup apa yang disebut apatisme politik, dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan-urusan politik serta orang yang terasing dari kehidupan politik, perlu diingat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk disini, motivasi untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak, walaupun di tengah wabah Covid-19. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama (Indra Richards Rompas, 2019).

Hal yang menarik bagi peneliti mengenai rencana penelitian ini adalah karena Negara Indonesia tetap menjalankan Pilkada serentak di tengah wabah Covid-19 sedangkan masyarakat tampaknya enggan memberikan hak pilihnya untuk Pilkada secara langsung karena adanya rasa khawatir akibat wabah Covid-19. Lain halnya di Kota Solok, partisipasi warga untuk mencoblos, ternyata di Kota Solok partisipasi warga terkait Pilkada meningkat dari tahun ke tahun, bisa dilihat sebelum pandemi partisipasi pemilih terlihat naik, tidak terlepas peran dari KPU dan pihak Pemerintah Kota Solok untuk mensosialisasikan kepada warga Kota Solok bahwa Pilkada itu salah satu kunci penting demokrasi. Angka partisipasi pemilih yang naik dari tahun ke tahun di Kota Solok menjadi salah satu kunci keberhasilan masyarakat Kota Solok menjalankan sistem demokrasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Data Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Solok Tahun 2005-2020**

No.	Tahun Pemilihan	Persentase Partisipasi
1.	2005	64, 15 %
2.	2010	68, 28 %
3.	2015	70, 45 %
4.	2020	76, 22 %

**Sumber: KPU Kota Solok**

Partisipasi pemilih tinggi di tengah pandemi juga kemungkinan karena suksesnya sosialisasi politik terhadap pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), bahwa mayoritas warga menganggap memilih pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat menjadi prioritas, meski tetap ada kekhawatiran tentang Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing data kelurahan dapat dibandingkan dengan Pilkada 2015.

**Tabel 1.2 Data Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Solok per Kelurahan Tahun 2015**

No.	Kelurahan	Persentase Pemilih
1.	Tanah Garam	70,50 %
2.	VI Suku	69,34 %
3.	Sinapa Piliang	72,97 %
4.	IX Korong	79,66 %
5.	Kampai Tabu Karambia	74,20 %
6.	Aro IV Korong	65,52 %
7.	Simpang Rumbio	68,31 %
8.	Koto Panjang	74,98 %
9.	Pasar Pandan Air Mati	68,12 %
10.	Tanjung Paku	68,21 %
11.	Nan Balimo	70,01 %
12.	Kampung Jawa	75,09 %
13.	Laing	73,16 %

Sumber: KPU Kota Solok 2015

**Tabel 1.3 Data Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Solok per Kelurahan Tahun 2020**

No.	Kelurahan	Persentase Pemilih
1.	Tanah Garam	78,55 %
2.	VI Suku	73,56 %
3.	Sinapa Piliang	77,40 %
4.	IX Korong	79,66 %
5.	Kampai Tabu Karambia	79,85 %
6.	Aro IV Korong	75,36 %
7.	Simpang Rumbio	75,01 %
8.	Koto Panjang	75,78 %
9.	Pasar Pandan Air Mati	73,58 %
10.	Tanjung Paku	77,19 %
11.	Nan Balimo	78,65 %
12.	Kampung Jawa	70,05 %
13.	Laing	84,32 %

Sumber: KPU Kota Solok 2021

Berdasarkan data di atas, peningkatan persentase paling tinggi di Kelurahan Laing, dari 73,16 % tahun 2015 dan tahun 2020 naik menjadi 84,32 %. Karena di Kelurahan Laing yang mempunyai persentase kenaikan pemilih paling tinggi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Kelurahan Laing. Peneliti

telah melakukan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021. Penelitian awal ini bertujuan untuk mengetahui sedikit banyaknya informasi tentang partisipasi politik di Kelurahan Laing dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan warga. Observasi awal ini juga dilakukan untuk mengetahui gambaran lokasi penelitian, subjek penelitian dan mengetahui sekilas tentang partisipasi politik pada masyarakat Kelurahan Laing.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini penting karena merupakan suatu fenomena yang telah terjadi di masyarakat saat ini. Dalam observasi awal, peneliti menemukan bahwa memang ada peningkatan partisipasi politik terhadap Pilkada serentak 2020 di Kota Solok.

Dengan demikian, rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan partisipasi politik Kota Solok khususnya Kelurahan Laing di tengah pandemi Covid-19.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan partisipasi politik di tengah wabah Covid-19 khususnya di Kelurahan Laing Kota Solok.

## 2. Tujuan Khusus

Terkait tujuan umum di atas, maka disusunlah tujuan-tujuan khusus yaitu:

- a. Mengurai upaya yang dilakukan KPU, pihak Kelurahan Laing dan pihak pasangan calon dalam meningkatkan partisipasi politik di tengah wabah Covid-19.
- b. Mengetahui alasan-alasan masyarakat ikut mencoblos dalam Pilkada serentak di tengah Covid-19 khususnya di Kelurahan Laing Kota Solok.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dari penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada bidang sosiologi politik, khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak pada tahun 2020 di tengah wabah Covid-19.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, acuan serta masukan bagi peneliti khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik (ikut mencoblos) sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Partisipasi politik

dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik berpengaruh terhadap sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal dengan istilah *voting* (pemungutan suara) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, kepala daerah maupun memilih kepala negara, akan tetapi memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi. Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Penelitian mengenai kegiatan ini menunjukkan bahwa persentase partisipasi dalam pemilihan umum seringkali berbeda dengan persentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata, maka dari itu untuk mengukur partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik lainnya, seperti yang dinyatakan Milbrath dan Goel ada tiga kategori dalam partisipasi politik:

1. Pemain (*Gladiators*)

5-7 % populasi termasuk *gladiators*, merupakan orang yang sangat aktif dalam dunia politik.

2. Penonton (*Spectators*)

60 % populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.

3. Apatitis (*Apathetics*)

33 % populasi termasuk *apathetics*, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.

Huntington dan Nelson (1994:21) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah :

- a. Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan (*neighborhood*): perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d. Partai: perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- e. Golongan (*Function*): perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan, dan pengaruh yang tidak sederajat.

### 1.5.2 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana memperkenalkan sistem politik

pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh kunjungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu itu berada, selain itu jugaditentukanolehinteraksipengalaman-pengalamaserta kepribadiannya (*Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behaviour*, Glencoe III., 1959).

Fenomena dalam kehidupan politik, Alex Thio dalam bukunya *Sociology An Introduction* seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku, yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik, seperti yang dijelaskan oleh Alex Thio, sosialisasi politik merupakan proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik. Sebagaimana telah disinggung di atas, sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan seseorang kepada suatu sistem politik, dan bagaimana orang tersebut memutuskan tanggapan dan reaksinya terhadap fenomena politik.

Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik, dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses *pedagogis* (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam

sosialisasi. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman dan kepribadiannya (Michael & Rush, 2001).

### **1.5.3 Pilkada Serentak**

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Soedarsono (2005:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PILKADA adalah dengan menerapkan sistem PILKADA Serentak (Prayudi, 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum adalah syarat minimal demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat, perwakilan daerah, dan presiden membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan Rakyat dikelola oleh wakil rakyat yang duduk dalam organisasi, menjalankan kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan presiden dan pemimpin daerah juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif serta presiden dan kepala daerah karena mereka telah dipilih secara langsung, maka mereka semua adalah perwakilan dari eksekutif fungsi kekuasaannya masing-masing. Kedudukan dan peran wakil rakyat dalam siklus administrasi nasional yang begitu penting, wakil rakyat harus benar-benar bertindak atas nama rakyat dan oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan peristiwa demokrasi langsung yang menarik untuk dikaji. Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam Pilkada antara lain pemilih, caleg, dan parpol, yang menjadi salah satu keunggulan caleg dalam memenangkan Pilkada. Dalam berkampanye, calon dituntut untuk menjangkau simpati pemilih. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan bagi kandidat untuk menganalisis bagaimana cara mendekati pemilih untuk mendapatkan simpati mereka.

Panitia Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok telah menetapkan 4 pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Solok yaitu Gerindra, PKPI, PPP dan PDI-P untuk Pemilihan Walikota (PILKADA) Kabupaten Solok tahun 2020. Pasangan calon pasangan Yutris Can - Irman Yefri Adang didukung Golkar dan Partai Demokrat, disusul pasangan calon kombinasi Ismael Koto - Edi Candra

yang diusung Partai Hanura dan PBB. Begitu pula dengan calon pasangan Zul Elfian – Ramadhani Kirana Putra, meski sempat terjadi penundaan lebih awal bagi calon pasangan Zul Elfian – Dhani, SK tersebut belum dikeluarkan karena adanya keterlambatan fase salah satu pasangan, dan selain itu ini, ada beberapa dokumen yang harus diserahkan. memperbaiki. Karena tahap tunda adalah pemeriksaan kesehatan, karena Zul Elfian sebelumnya sudah dipastikan positif Covid-19, diisolasi mandiri dan dinyatakan sembuh.

Ketentuan mengenai “pemilu serentak” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini digelar pada Senin (13/1/2020), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan dua perkara ini digabung karena adanya kesamaan materi yang diuji. Adapun materi Undang-Undang Pemilu yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, Pasal 347 ayat (1) frasa “pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”. Selain menguji materi UU Pemilu, Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 juga menguji ketentuan pemilihan serentak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PILKADA).

Demokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal yang dapat melakukan kontrol atau otoritas yang tidak terkendali. Hasilnya adalah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memenuhi kepentingan publik sebanyak mungkin. Demokrasi dicirikan oleh pemilihan umum yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

#### **1.5.4 Pandemi Covid-19**

Belakangan ini dunia sedang digemparkan oleh wabah virus corona yang menyerang Kota Wuhan, China, dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara lain sehingga menjadi perhatian global. Virus atau wabah yang baru muncul akhir tahun 2019 ini banyak merenggut nyawa setiap harinya. Selain menimbulkan korban jiwa, Covid-19 ini menyebabkan segala aktivitas dunia lumpuh dan berdampak besar terhadap negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti Indonesia.

Covid-19 mengacu pada sekelompok kasus pneumonia virus yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei sejak Desember 2019. Menurut penyelidikan oleh Otoritas Kesehatan China, coronavirus baru ditemukan sebagai agen penyebab. Gejala klinis ini meliputi demam, kelelahan, batuk tidak berdahak dan sesak napas. Manusia yang terinfeksi menyebarkan virus ke lingkungan. Interaksi protein spike coronavirus dengan reseptor sel komplementernya sangat penting dalam menentukan infektivitas virus. Coronavirus terutama menyerang sel-sel epitel. Virus ini ditransmisikan dari satu host ke host lain, baik secara aerosol, fomite, atau rute fecal-oral. Coronavirus pada manusia menginfeksi sel-sel epitel

saluran pernapasan, sedangkan coronavirus pada hewan umumnya menginfeksi epitel sel-sel saluran pencernaan. SARS coronavirus, misalnya, menginfeksi melalui rute aerosol, sel-sel epitel paru-paru manusia dengan mengikat reseptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). Beberapa kasus kondisinya parah. Orang berusia lebih dewasa atau tengah menderita suatu penyakit berisiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang lebih parah. Cara penularan utamanya dengan melalui titik-titik air dari saluran pernafasan, virus juga dapat ditularkan melalui kontak. Kebanyakan orang memperkirakan bahwa periode inkubasinya bervariasi antara 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Tindakan preventif yang sesuai anjuran pemerintah dan badan kesehatan dunia harus dilakukan dalam upaya pencegahan virus corona seperti hindari keramaian, kurangi kontak fisik, cuci tangan setelah memegang benda apapun, serta jaga kesehatan dengan berolahraga, perbanyak konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah-buahan dan multivitamin (drh. Galuh Ardhanaricwari Hanum, 2020).

Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara yang berani mengambil risiko mengadakan pemilihan di bawah ancaman pandemi Covid-19. Hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan PILKADA selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih. Rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pemilu kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara. Merujuk data terakhir yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, selama pengawasan tahapan kampanye tatap muka, dari total 91.640 terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan, 1.618 diberikan surat peringatan dan 197 pembubaran kegiatan kampanye. Hal ini berarti, kesadaran terhadap protokol kesehatan belum menjadi perhatian serius dari

seluruh pihak. Padahal, *trend* penyebaran virus Covid-19 semakin melonjak tajam (Pita Anjarsari, 2020).

### 1.5.5 Tinjauan Sosiologi

Pada penelitian ini peneliti akan menggali persoalan tentang partisipasi masyarakat Kota Solok terhadap Pilkada di tengah pandemi Covid-19, dalam menjelaskan hal tersebut peneliti menggunakan teori tindakan sosial karena terlihat tampak dalam gagasan dasarnya bahwa keputusan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh tindakan sosial (rasional). Selanjutnya, tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan yang ditujukan pada benda mati/fisik tanpa ada hubungan dengan orang lain termasuk tindakan sosial. Menurut Max Weber, tentang tindakan sosial antar-hubungan sosial “tindakan yang penuh arti” dari individu. Tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan yang ditujukan pada benda mati/fisik tanpa ada hubungan dengan orang lain termasuk tindakan sosial (Ritzer dan Goodman, hal 132-133).

Metodologi sosiologi digambarkan sebagai panduan pertemuan lokal dan setiap pertemuan dipandang sebagai premis bantuan untuk pihak tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan orientasi seksual (perempuan dan laki-laki), seperti halnya kecenderungan mencoblos, merupakan hasil dari karakteristik sosial-ekonomi, seperti pekerjaan, kelas, agama dan filsafat usia (muda dan tua). Juga dapat didirikan pada asosiasi konvensional dan kasual. Metodologi

sosiologis mengharapkan bahwa kecenderungan politik. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.

Varian utama dari tindakan sosial (rasional) mengasumsikan bahwa individu memiliki semua kemampuan rasional, waktu, dan keterikatan emosional yang diperlukan untuk memilih arah tindakan yang baik, tidak peduli seberapa rumit pilihannya. Pertanyaan paling sederhana ketika setiap tindakan ditentukan, konseptualisasi dalam pengambilan keputusan yang di parameterisasi ada hasil yang diketahui (sehingga tidak ada risiko atau ketidakpastian) dan hubungan-hubungan antara tindakan dan hasil tidak dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Individu dianggap mampu mengevaluasi hasil dan tindakan, jadi untuk setiap pasangan alternatif a dan b, dapat dikatakan a lebih baik dari b dan b lebih baik dari a, atau kedua hasilnya berbeda-beda. Orang yang rasional memilih tindakan / hasil yang paling layak tersedia untuk mereka.

Memahami permasalahan partisipasi pemilih teori lain yang dapat dipakai untuk penelitian yaitu teori sosialisasi politik. Maka peneliti merasa perlu untuk menambahkan pula teori sosialisasi politik. Teori ini akan melengkapi teori

sebelumnya dengan menjelaskan adanya pengaruh sosialisasi politik dalam Pilkada serentak di tengah masa pandemi Covid-19, dalam teori yang disebutnya suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang. Tidak hanya memperkenalkan saja, tetapi juga bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala politik yang ada seperti yang dirasakan pada saat Pilkada tetap diadakan, walaupun di tengah wabah Covid-19. Salah satu elemen terpenting dalam sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa dan kontak-kontak politik langsung.

### 1.5.6 Penelitian Relevan

Sebuah penelitian membutuhkan dukungan penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi di masa lalu pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan merupakan aspek penelitian yang juga mempengaruhi dan mendukung sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang partisipasi masyarakat Kota Solok dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

**Tabel 1.4 Penelitian Relevan**

No .	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Doni Sagiari Surbakti 2019	Partisipasi politik masyarakat pada pilpres tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor <i>money politic</i> (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik	-meneliti tentang partisipasi politik -metode penelitian kualitatif.	-Teori berbeda -Lokasi dan tahun penelitian

			(4%). Penelitian ini cukup representative untuk dijadikan sebagai gambaran mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, baik pemilukada, pemilu presiden maupun pemilu legislatif.		
2.	Toni Anwar Mahmud. 2020	Partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2020.	Dengan terbitnya PKPU tersebut memberikan rasa aman bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi politik masyarakat dapat terjaga meskipun pada kenyataan tidak mencapai angka mendekati 90% penggunaan hak pilihnya. Antusiasme masyarakat untuk memilih telah mendapatkan jaminan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga KPU Kota Tangerang Selatan sehingga kekhawatiran masalah pandemi Covid-19 dapat dicegah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai PKPU. Disamping itu calon-calon walikota Tangerang Selatan menjadi salah satu dorongan masyarakat untuk datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan.	-Partisipasi politik -Metode penelitian kualitatif	-Teori berbeda -Lokasi penelitian
3.	Inggried Fena Meyliana, Dewi Erowati. 2020.	Menakar partisipasi politik masyarakat kabupaten Tanah Toraja	Sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkesinambungan dalam melahirkan kebijakan yang	-Partisipasi politik -Metode penelitian kualitatif	-Teori berbeda -Lokasi penelitian

		terhadap pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2020.	diterima masyarakat. Oleh sebab itu, sistem politik, akan berjalan apabila input dan output dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi PILKADA 2020 di Tanah Toraja, harus ada regulasi yang tepat untuk mengedepankan aspirasi masyarakat. Sehingga, masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terbebas dari ancaman Covid-19.		
4.	Nita Puspita. 2020	Partisipasi politik perempuan pada pemilihan gubernur NTB pada tahun 2018	Tingkat partisipasi politik Perempuan pada Pemilihan Gubernur, dimana pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang. Ketika seseorang memiliki kesadaran politik yang diperoleh dari pengetahuan politik sehingga mempengaruhi partisipasi politik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut	-Partisipasi politik -metode penelitian kualitatif	-Lokasinya berbeda -Teorinya berbeda
5.	Elisa Justia. 2019	Partisipasi politik pemilih pemula Pemilukada Aceh Selatan 2018	Pemilih pemula tetap pada pendirian mereka apa yang ingin mereka pilih, tidak peduli bagaimana dorongan-dorongan dari luar yang mempengaruhi mereka sebelum melakukan pencoblosan pada saat	-Partisipasi Politik -Penelitian deskriptif/kualitatif	-Lokasinya berbeda -Teorinya berbeda - Sasarannya ke pemilih pemula.

			PILKADA menjelang. Pemilih pemula tidak mudah lagi dipengaruhi oleh pihak luar.		
--	--	--	---	--	--

Perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian di atas yakni lokasi penelitian yang berbeda, daerah yang berbeda, memiliki kondisi sosiologis yang berbeda dan waktu-waktu penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada. Namun, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas pada setiap kontestasi Pilkada. Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimplikasi terhadap tingkat partisipasi di Pilkada serentak 2020.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan yang dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut, bagaimana Tujuan penelitian ilmiah adalah untuk memperoleh data yang mampu mendeskripsikan, membuktikan, Mengembangkan dan menemukan pengetahuan dan teori untuk memahami, memecahkan dan memprediksi masalah dalam kehidupan manusia. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan partisipasi politik masyarakat

Kota Solok terhadap Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada pada masyarakat terutama pada informan yang akan diteliti secara langsung mengenai aktivitas yang terjadi sehari-hari hingga interaksi.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian. Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan, menurut Lincoln dan Guba (1985:30-44), karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Ada beberapa asumsi menurut Lincoln dan Guba:

1. Tindakan pengamatan memengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman.
2. Konteks sangat menentukan dalam menentukan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.

3. Sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicari.

Dalam menggambarkan secara mendalam mengenai data yang didapat dari lapangan tentang partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

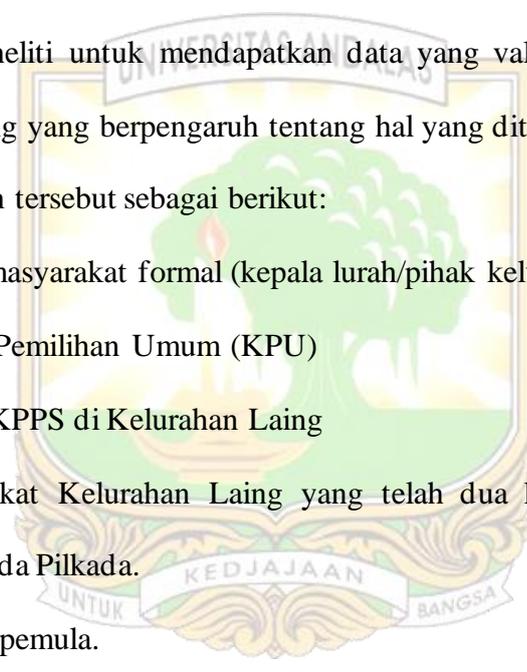
### **1.6.2 Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan lah informan. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010:300), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Menurut pernyataan Sugiyono (2012:54) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti. Dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*

*sampling* yakni dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya.

Afrizal (2014: 141) menyatakan ketika akan menerapkan kriteria informan perlu disadari status informan yang diperlukan, sebagai informan pengamat atau pelaku atau keduanya. Kriteria yang dirumuskan haruslah benar-benar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Kriteria informan mestilah orang-orang yang berpengaruh tentang hal yang diteliti. Dalam penelitian ini kriteria informan tersebut sebagai berikut:

- 
- a. Tokoh masyarakat formal (kepala lurah/pihak kelurahan)
  - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  - c. Panitia KPPS di Kelurahan Laing
  - d. Masyarakat Kelurahan Laing yang telah dua kali ikut memberikan suara pada Pilkada.
  - e. Pemilih pemula.
  - f. Calon walikota/wakil walikota dalam Pilkada serentak tahun 2020

### **1.6.3 Data yang diambil**

Ada tiga jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut penjelasannya:

1. Data primer / tindakan, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer

didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari para informan yakni masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Laing Kota Solok.

2. Data sekunder / Sumber Tertulis, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur dan bacaan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dan menunjang penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data, teori, metode penelitian dari referensi buku, katalog yang berkaitan-berkaitan serta menunjang hasil penelitian, mencari data-data yang dibutuhkan melalui website / *web*. Adapun data sekunder yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah berupa jumlah partisipasi politik masyarakat Kota Solok terhadap Pilkada Serentak di tengah Covid-19.

3. Foto

Sekarang foto ini sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan peneliti karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisa secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat

dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Semua yang diuraikan di atas pada umumnya memberikan gambaran tentang foto sebagai data atau sebagai pendorong ke arah menghasilkan data. Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain, sebaliknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain yang dialami pada masa lalu. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (triangulasi).

Dalam wawancara ini, penulis menanyakan beberapa hal yaitu mengenai peningkatan partisipasi politik masyarakat Kelurahan Laing terhadap Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Wawancara ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang mendalam mengenai melonjaknya partisipasi politik

masyarakat Lain terhadap Pilkada Serentak di tengah Covid-19. Jadi melalui wawancara yang dilakukan maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. (Moleong, 1989:330).

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Data analisis unit merupakan satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk fokus kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian objek lain yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam sebuah penelitian itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus topik permasalahan yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit individu atau personal, yaitu pemilih yang ikut serta memilih, penyelenggara (KPU dan Kelurahan Laing) dan pasangan calon (aktor) dalam Pilkada Serentak 2020.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), menyatakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari narasumber melalui hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses penelitian serta pada akhir penelitian. Senada pandangan Nasution (2003, hlm. 129) berpendapat bahwa tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap

data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci. Dalam hal ini penulis melakukan pemilihan data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini. Dari wawancara yang telah dilakukan pada ketiga narasumber tidak semua data yang ada sesuai dengan harapan penulis, maka penulis melakukan pemilihan terhadap data yang ada, hanya data yang sesuai dengan sesuai harapan pada bab selanjutnya.

b. Display Data

Tahap display pada penelitian ini yaitu peneliti menentukan penyajian dalam penelitian agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan pada tahap selanjutnya, tahap penyajian data dapat dituangkan dalam Bentuk gambar, grafik. akan mudah dipahami, supaya dapat mengambil kesimpulan yang tepat.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Afrizal (2014: 180) menyatakan salah tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding

dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

### **1.6.7 Definisi Operasional Konsep**

1. Perilaku pemilih dalam partisipasi masyarakat terhadap Pilkada Serentak 2020.
2. Pilkada serentak merupakan pemilihan umum Kepala daerah serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di tengah pandemi covid 19 pada tahun 2020.
3. Covid-19 yang membuat partisipasi masyarakat Kota Solok khususnya Laing mengalami peningkatan terhadap Pilkada Serentak 2020.

### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Seperti apa yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Alasan memilih lokasi ini yaitu dikarenakan tingginya partisipasi masyarakat Kelurahan Laing sebesar 84,32 % terhadap Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Afrizal (2014: 128) menyatakan lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga pada organisasi dan sejenisnya.

### 1.6.9 Jadwal Rencana Penelitian

Jadwal rencana penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal rencana penelitian agar penelitian yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun rancangan jadwal rencana penelitian sebagai pedoman sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5 Jadwal Rencana Penelitian**

No	Nama Kegiatan	BULAN					
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022
1	Seminar Proposal	■					
2	Penelitian Lapangan		■				
3	Analisis Data			■			
4	Bimbingan dan Penulisan Skripsi			■	■	■	
5	Ujian Skripsi						■

